

**HUBUNGAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN
DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA MAMAHAN KECAMATAN GEMEH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Oleh : Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai

ABSTRAK

Penelitian yang menyoroti masalah kemiskinan masyarakat desa Mamahan merupakan salah satu tugas akhir (Skripsi) untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado ini didahului dengan pengamatan awal yang hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan program RASKIN terindikasi belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kondisi pengelolaan program RASKIN dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan; dan (2) Menganalisis apakah tingkat kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program RASKIN di desa yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif/ Data dikumpulkan melalui teknik kuesioner yang disebarakan kepada 30 responden dari unsur aparat desa dan pengelola Raskin, serta 30 orang lainnya dari unsur masyarakat penerima manfaat program Raskin. Data dianalisis dengan menerapkan teknik analisis persentase (analisis tabel frekuensi), analisis Chi-Square (kai-kwadrat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori "sedang" atau menengah. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Disarankan agar program ini terus dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan dengan terus-menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada dititik distribusi (desa).

Kata Kunci : Efektivitas, Raskin, Kesejahteraan ,asyarakat.

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinann, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai

saat ini terus-menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan, namun hanya terkesan *trial and error*.

Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan masyarakat selama ini belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat miskin itu sendiri sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh kebawah garis kemiskinan (Anonimous, 2007).

Senada dengan hal tersebut, Kuncoro (1997), menegaskan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu masalah sentral dalam pembangunan ekonomi, khusus dinegara-negara sedang berkembang, - termasuk Indonesia -, karena kelompok orang miskin berjumlah besar atau bahkan merupakan mayoritas.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program RASKIN, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ketinggian Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait.

Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut. Pelaksanaannya di daerah, khususnya di provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi

Utara yang berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara mencakup 3 (tiga) kota dan 7 (tujuh) Kabupaten, termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kaitannya dengan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya di desa Mamahan kecamatan Gemeh sebagai lokasi penelitian ini, di mana hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa dari 84 Rumah Tangga Miskin (RTM), hanya berhasil disalurkan Raskin sebanyak 54 RTM atau sebesar 64.29 %. Selain itu, dari kuota yang ditetapkan untuk setiap RTM yang seharusnya menerima 10 kg beras netto per bulan dengan harga Rp. 2500 per kg, ternyata setiap RTM hanya menerima 8 kg per bulan dengan harga Rp. 3000 per kg.

Hasil pengamatan awal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) belum seluruhnya efektif, terutama dilihat dari aspek jumlah kelompok sasaran, volume beras dan harga, sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : Efektivitas Pengelolaan program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan identifikasi masalah pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1). Bagaimana pengelolaan program RASKIN dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud? 2). Apakah meningkatnya kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program RASKIN di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud ?.

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mendeskripsikan kondisi pengelolaan program RASKIN dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. 2). Menganalisis apakah tingkat kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program RASKIN di desa yang sama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan social, khususnya bidang kajian administrasi public; dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi

pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan khususnya Tim Raskin untuk melakukan penataan terhadap manajemen distribusi Raskin agar tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebutuhan Dasar

Dewasa ini, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang cukup besar jumlahnya, dengan demikian maka upaya-upaya pemerataan pendapatan masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai bidang kehidupan masyarakat, agar mereka yang tergolong "miskin" ini setidaknya memiliki kemampuan guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok yang dimaksud sebagai kebutuhan dasar (*basic human needs*), yakni kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian), maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan). Dalam kaitan ini, Radwan dan Alftan (1978) mengemukakan bahwa tanpa mengurangi konsep *basic needs*, keperluan minimum dari seorang individu atau rumah tangga berupa: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, transportasi dan partisipasi.

Lain halnya dengan The Kian Wie (1983), mengemukakan kebutuhan pokok sebagai suatu paket barang dan jasa yang oleh masyarakat dianggap perlu tersedia bagi setiap orang. Kebutuhan ini merupakan tingkat minimum yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Hal ini berarti bahwa kebutuhan pokok berbeda dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negeri ke negeri lain, jadi kebutuhan pokok itu spesifik. Selain itu, dalam suatu konferensi di Kenya tahun 1976, disarankan agar strategi dan politik pembangunan lebih di prioritaskan kepada tujuan memenuhi kebutuhan pokok penduduk tiap-tiap negara.

Sehubungan dengan hal itu, Green dan Evers (*dalam* Sumardi & Evers 1985), mengemukakan model kebutuhan dasar sebagai suatu strategi memenuhi lima sasaran pokok, yaitu : 1). Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan atau perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu. 2). Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, program preventiv dan kuratif kesehatan air minum, pemukiman dan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi baik rural maupun urban. 3). Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 4).

Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, ataupun dari perdagangan internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya. 5). Menjamin adanya partisipasi masa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, munculnya *basic human needs* dengan lima sasaran tersebut karena *growth oriented approach* yang telah di anggap memberi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, belum dapat memberikan dampak pemerataan pendapatan penduduk/masyarakat secara luas.

Sejalan dengan pandangan di atas, Radwan dan Alfhan (1978) mengemukakan bahwa terdapat pandangan baru yang menunjukkan bahwa ukuran pendapatan perjiwa saja tidak mewakili kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Kegagalan *Growth oriented strategis approach* dalam mengurangi ketidak merataan pendapatan masyarakat dan membasmi kemiskinan. Oleh karena itu dituntut adanya perubahan besar dalam pembangunan dengan berbagai sistem pendekatan yang jitu terhadap upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penghapusan kemiskinan, dan kekurangan lapangan pekerjaan, maka upaya pendekatan *basic human needs* dari ILO pada dasarnya juga mencerminkan perubahan arah pembangunan ini. Dalam kaitan ini, program RASKIN merupakan salah satu kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yakni kebutuhan akan pangan, khususnya beras yang cukup dengan kelompok sasaran adalah rumah tangga miskin (RTM).

Konsep Kemiskinan dan Kesejahteraan

Menurut Ismanto (1991), kemiskinan dapat diidentifikasi dari dimensi sosial, politik dan ekonomi. Sehubungan dengan itu dikenal kemiskinan sosial atau kemiskinan budaya, kemiskinan politik dan kemiskinan ekonomi. Kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial, struktur sosial yang kurang mendukung serta keterbatasan akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada (Effendi, 1993).

Kemiskinan politik adalah ketidakberdayaan atau ketidakmampuan politik suatu kelompok atau golongan masyarakat luas dalam mempengaruhi proses alokasi sumberdaya (Bulkin, 1998). Sedangkan kemiskinan ekonomi diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya diartikan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak tersebut. (Esmara, 1986) .

Prayitno dan Lincolin (1978), mengemukakan adanya karakteristik kemiskinan yang meliputi : 1). Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Walaupun memiliki, tapi pada umumnya tidak mencukupi, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 2). Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. 3). Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar. 4). Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja diluar sektor pertanian.

Ada beberapa pendekatan dalam mengukur kemiskinan, misalnya pendekatan kebutuhan (Sayogyo, 1987), kebutuhan kalori per hari (BPS, 1990) dan pendekatan pengeluaran. Sayogyo (1987) mengembangkan cara mengukur kemiskinan dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan akan beras dan gizi, yaitu :

1. Golongan paling miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kilogram.
2. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras sebanyak 240 - 360 kilogram.
3. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 360 kilogram tetapi kurang dari 480 kilogram.

Dalam pada itu, konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah : 1). Tingkat pendapatan keluarga; 2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4). Tingkat kesehatan keluarga, dan 5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan : 1). Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; 2). Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 3). Dengan melihat

kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4). Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat *perkembangan fisik* (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat *mentalnya*, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan *kedudukan sosial* (social status)

Salah satu konsep indikator sosial dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga ialah konsep yang diperkenalkan oleh *Overseas Development Council* yang dikenal dengan PQLI (*Physical Quality of Life Index*) atau indeks mutu hidup. PQLI mencakup 3 komponen, yaitu: (i) rata-rata angka kematian bayi (*infant mortality rate*), (ii) rata-rata harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (*life expectancy at age one*), dan (iii) tingkat kemampuan membaca dan menulis atau rata-rata persentase buta dan melek huruf (Budiman, 1996).

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (*basic needs*). Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok ini meliputi: (1) makanan, nutrial, lapangan kerja, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi, (8) energi, (9) hukum, (10) dinamika politik dan implikasi idiologi (Soedjatmiko, 1998). Kemudian konferensi International Labor Organization (ILO) di Geneva Tahun 1976, dikemukakan konsep kebutuhan pokok/dasar mencakup 2 hal, yaitu : (1) konsumsi minimum untuk keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan (2) pelayanan negara (*public services*) untuk masyarakat pada umumnya, seperti air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 1987).

Selanjutnya, konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan akhir-akhir ini ialah konsep *Human Development Index* atau HDI. Konsep HDI diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1985 (Miles, dalam Moeljarto dan Prabowo, 1997). Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapat penekanan yang berbeda, tetapi intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak. *Human Development Index* (HDI) ini

mempunyai tiga komponen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan (kemakmuran), yaitu : (1) angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*), jadi menyangkut kesehatan; (2) tingkat pendidikan (*educational attainment*), dan (3) tingkat pendapatan (*income*) atau kemampuan daya beli masyarakat (Moeljarto dan Prabowo, 1997).

Dari konsep-konsep yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa dalam konsep indikator ekonomi digunakan tingkat pendapatan (*income percapita*) sebagai ukuran kesejahteraan/kemakmuran ekonomi masyarakat; kemudian, PQLI ialah indikator sosial yang mengukur tingkat kesejahteraan pada aspek-aspek sosial yakni pada aspek-aspek kualitas atau mutu hidup; sedangkan HDI menitikberatkan pada kesejahteraan tingkat individu, seperti halnya dengan PQLI.

BKKBN (1993) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/ taraf hidup masyarakat, terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu : 1). Keluarga Prasejahtera; yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. 2). Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 3). Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/ perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi, dan sebagainya. 4). Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. 5). Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

Bila dikaji lebih jauh mengenai indikator-indikator pengukuran kesejahteraan oleh BKKBN tersebut di atas, dapat dilihat bahwa konsep tersebut pada dasarnya telah mencakup komponen-komponen pengukuran kesejahteraan yang diuraikan sebelumnya, yaitu mencakup komponen-komponen seperti : (1) kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan, (2) kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis

seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja; (3) kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dan sebagainya; (4) kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Efektivitas Pengelolaan program Raskin

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "Efektivitas". Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

Menurut Gibson et.al (1996) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni *input*, *conversion*, dan *output* atau keluaran, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber

daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengguna.

Program RASKIN bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras, sedangkan sasaran Program RASKIN, adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 2.500 per Kg netto ditingkat distribusi.

Implementasi program Raskin di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan Program RASKIN, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, baik ditingkat Pusat dan Daerah, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait.

Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program Raskin, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal dengan istilah "prinsip-prinsip pengelolaan". Adapun Prinsip pengelolaan program Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASKIN, yaitu :

Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan RASKIN baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku RASKIN terutama masyarakat penerima RASKIN, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (RASKIN), maka yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; RASKIN hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
2. Tepat Jumlah; Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.
3. Tepat Harga; Harga beras RASKIN adalah sebesar 2.500 rupiah per Kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan Distribusi beras RASKIN kepada RTM Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu.

Untuk mencapai efektivitas penyaluran Raskin, maka mekanisme pelaksanaannya perlu diatur dengan baik sebagaimana dikemukakan dalam buku Pedoman Umum "Raskin" (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011.

Efektivitas Pengelolaan Program RASKIN Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk dapat pemeratakan pendapatan masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa kontribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatan kepada masyarakat dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan perlu diciptakan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor non formal, dapat memberikan dorongan/motivasi dalam berbagai bentuk, menciptakan iklim perekonomian yang agak longgar atau dengan kata lain lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi usahanya, dan lain-lain. Salah satu upaya tersebut ialah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan untuk rakyat miskin yang dikenal dengan istilah Raskin atau Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang telah teruji

dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan.

Dengan demikian, maka upaya peningkatan daya beli masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus, atau dalam artian bahwa pemerataan pendapatan dengan sendirinya akan berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, Sigit (1983) mengemukakan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk/rumah tangga mengandung dua segi. Pertama, meningkatkan tingkat kehidupan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan; kedua, pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit perbedaan-perbedaan tingkat pendapatan antar rumah tangga. Usaha memperkecil persentase kelompok ini bisa berakibat pada pembagian pendapatan yang lebih merata yaitu jika pendapatan golongan atas tidak melonjak naik lebih cepat. Tapi dua segi tersebut tidak perlu saling berhubungan. Peningkatan taraf hidup golongan bawah tidak harus berakibat pada lebih meratanya distribusi pendapatan. Karena itu kedua-duanya harus di usahakan bisa dengan tekanan berbeda. Logisnya, menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan golongan bawah lebih dulu, karena problem ini menyangkut kebutuhan dasar mereka yang sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Myrdal (dalam Todaro, 1994) mengatakan bahwa tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan taraf hidup yang rendah. Rendahnya pendapatan ditambah dengan rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyebabkan produktifitas yang rendah pula dan pada gilirannya tetap melestarikan pendapatan yang rendah sehingga seseorang atau keluarga tertentu tidak mampu memiliki berbagai fasilitas dan sarana pembaharuan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan hidup keluarga.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memperoleh pendapatan memadai atau tinggi akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya mereka. Program Raskin bertujuan untuk meringankan beban keluarga dari sisi pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok (beras) sehingga pendapatan yang seharusnya dibelanjakan untuk pangan (beras) sebagian dapat ditabung atau diinvestasikan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lain seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan demikian terlihat adanya benang merah hubungan antara implementasi program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan keluarga atau masyarakat pada umumnya.

Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu : Terdapat hubungan antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan program Raskin dan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari : (1). Efektivitas pengelolaan program Raskin sebagai *independent* (variabel bebas) yang disimbolkan dengan X dan (2). Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel *dependent* (terikat) yang disimbolkan dengan Y. Definisi operasional tak lain daripada mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat, 1994).

Berikut dikemukakan definisi operasional serta indikator kedua variabel penelitian tersebut :

1. Efektivitas pengelolaan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) adalah proses pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek efektivitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; RASKIN hanya diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat Raskin (PMR) hasil musyawarah desa Mamahan yang tercantm dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
 - b. Tepat Jumlah; jumlah beras RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

- c. Tepat Harga; harga beras RASKIN adalah sebesar 2.500 rupiah per Kg netto di Titik Distribusi atau ditingkat desa.
 - d. Tepat Waktu; waktu pelaksanaan distribusi beras RASKIN kepada rumah tangga miskin (RTM) Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan rencana distribusi.
 - e. Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu.
2. Kesejahteraan hidup masyarakat adalah kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I berdasarkan konsep BKKBN, sebagai penerima manfaat program Raskin yang diamati dari tingkat kecukupan akan pangan, sandang dan papan (rumah tempat tinggal) sebagai kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, kesehatan dan gizi, serta sanitasi dan partisipasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sementara Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono: 1998).

Mengacu pada konsep di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa dan pengurus serta anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan PKK desa Mamahan yang di dalamnya termasuk Tim Raskin tingkat desa, yang sesuai hasil survei berjumlah lebih-kurang 55 orang, sedangkan jumlah keluarga miskin penerima manfaat program Raskin sebanyak 54 RTM.

Untuk menentukan ukuran atau besar sampel, peneliti menggunakan teknik purposive (sengaja) dengan menetapkan jumlah anggota sampel (responden) dari unsur aparat atau perangkat desa sebanyak 30 orang dan unsur masyarakat penerima manfaat program Raskin sebanyak 30 RTM. Dengan demikian besar sampel keseluruhan sebanyak 60 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjangkau data primer ialah daftar pertanyaan atau kuesioner serta dibantu dengan teknik wawancara yang dipandu melalui panduan wawancara (*interview-guide*). Untuk memperoleh data sekunder digunakan penelitian dokumentasi dan semua data dikumpulkan melalui teknik survei dan observasi langsung dilokasi penelitian (Hadi, 1989).

Instrumen dalam bentuk kuesioner disusun dengan terlebih dahulu merumuskan indikator-indikator untuk masing-masing variabel. Selanjutnya indikator-indikator tersebut

dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang dikemudian didistribusikan kepada responden terpilih, baik dari unsur aparat atau perangkat kelurahan maupun dari unsur RTM penerima Raskin.

Mencermati sifat dan karakteristik variabel serta metode penelitian yang digunakan, maka teknik atau cara analisa data yang relevan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 1). Teknik prosentasi (distribusi frekuensi) atau analisis tabel, digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penelitian. 2). Analisis Kai-Kwadrat (*Chi-square Test*) ; teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya hubungan antara variabel efektivitas pengelolaan program Raskin (X) dengan variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Analisis *chi-square* dilakukan berdasarkan tabulasi silang antara data kedua variabel tersebut. 3). Analisis Koefisien Kontingensi ; teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui/mengukur tingkat keeratan (derajat) hubungan antara kedua variabel yang diuji. Koefisien kontingensi dihitung berdasarkan nilai *chi-square* hasil analisis data.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pelaksanaan direncanakan lebih-kurang selama 3 (tiga) bulan sejak disetujuinya judul skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Program Raskin

Efektivitas pengelolaan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) adalah proses pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek efektivitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

Mengacu pada indikator tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Daftar pertanyaan Penelitian (kuesioner) sebanyak 5 (lima) butir pertanyaan dan didistribusikan kepada 60 responden terpilih. Setiap butir pertanyaan disediakan 5 (lima) opsi jawaban untuk dipilih responden dengan diberi nilai skor 5 : 4 : 3 : 2 : 1. Dengan demikian, total nilai skor tertinggi untuk variabel ini adalah $5 \times 5 = 25$; dan total nilai skor terendah adalah $5 \times 1 = 5$.

Untuk keperluan analisis data (penyusunan Tabel distribusi frekuensi), maka data variabel ini dikelompokan menjadi tiga kategori (kelas), yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi, dengan teknik kategorisasi sebagai berikut :

- Rentang (R) = Skor tertinggi dikurangi skor terendah;
- Kategori/banyaknya kelas (k_i) = 3 (tiga)

- Panjang Kelas Interval (P) = Rentang dibagi Kategori (banyaknya kelas interval), atau $P = \frac{\text{Rentang}}{k}$ **Error!**

Diketahui :

- Skor Tertinggi = 25
- Skor terendah = 12

Jadi :

- R = 25 - 12 = 13
- $k_i = 3$
- P = **Error!** = **Error!** = 4,33 dibulatkan ke atas menjadi 5

Mengacu pada hasil pengumpulan data terhadap 60 responden, diperoleh gambaran mengenai distribusi frekuensi jawaban responden tentang pengelolaan program Raskin di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pengelolaan program Raskin

Nomor	Kategorisasi Variabel	Kelas Interval	Frekuensi	
			(f)	(%)
1	Rendah	12 - 16	12	20.00
2	Sedang	17 - 21	32	53.33
3	Tinggi	22 - 25	16	26.67
Junlah			60	100.00

Dari distribusi data di atas, dapat diketahui bahwa sebaran skor variabel efektivitas pengelolaan program Raskin berada pada kelas interval 17 – 21 atau terkategori “sedang” atau menengah cenderung “tinggi”. Dengan demikian, hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan program Raskin belum optimal dilakukan. Hasil analisis tersebut sejalan dengan skor rata-rata variabel pengelolaan program Raskin, yakni sebesar 19,5 atau $\pm 78\%$ dari skor ideal atau skor teoritiknya yakni 25 skor.

Belum optimalnya pengelolaan program Raskin terutama berkaitan dengan indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang seharusnya sebanyak 84 Rumah Tangga Miskin (RTM), namun dapat terlayani hanya sekitar 54 RTM atau sebesar 64.29 % saja. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa volume beras yang diterima oleh setiap RTM seharusnya 10 Kg, ternyata hanya 8 Kg per bulan dengan harga per Kg sebesar Rp. 3000, yang seharusnya hanya sebesar Rp. 2500 per kg. Dengan demikian, masyarakat Desa

Mamahan, khususnya RTM yang ditemui merasa yakin bahwa pengelolaan program Raskin di desa mereka terlaksana dengan efektivitas yang terkategori masih "sedang".

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup masyarakat adalah kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I berdasarkan konsep BKKBN, sebagai penerima manfaat program Raskin yang diamati dari indikator-indikator yang relevan.

Mengingat variabel ini memiliki dimensi waktu yang berbeda, yakni antara "sebelum" dan "sesudah" pelaksanaan program Raskin bagi RTM, maka data variabel Kesejahteraan masyarakat (Y) yang diperlukan ialah waktu antara sebelum (Y_1) dan sesudah (Y_2) pelaksanaan program Raskin. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan instrumen (kuesioner) dengan model chek-list dua sisi (sisi kiri = sebelum dan sisi kanan = sesudah). Setelah kuesioner dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah/prosedur sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Tingkat Kesejahteraan RTM sebelum Penyaluran Raskin

Nomor	Kategorisasi	Kelas Interval	Frekuensi	
			(f)	(%)
1	Rendah	18 - 24	24	40.00
2	Sedang	25 - 31	33	55.00
3	Tinggi	32 - 37	3	5.00
Jumlah			60	100.00

Distribusi data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran skor variabel kesejahteraan RTM sebelum penyaluran Raskin berada pada kelas interval 25 – 31 dengan frekuensi sebanyak 33 responden atau sebesar 55 % dengan kategori "sedang" cenderung "rendah" (40%), dan hanya 5% dari total responden yang diwawancarai, yakni sebanyak 60 orang terkategori "tinggi". Sementara itu, hasil analisis data pada Tabel 3 yang menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan RTM penerima Raskin.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Tingkat Kesejahteraan RTM Setelah Penyaluran Raskin

Nomor	Kategorisasi	Kelas Interval	Frekuensi	
			(f)	(%)
1	Rendah	19 - 25	5	8.33
2	Sedang	26 - 32	36	60.00
3	Tinggi	33 - 39	19	31.67
Jumlah			60	100.00

Data pada Tabel 3, menunjukkan bahwa sebaran skor variabel ini berada pada kelas interval 26 – 32 dengan frekuensi sebanyak 36 responden atau sekitar 60 % cenderung "tinggi" (31,67 %) dari total responden sebanyak 60 orang. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat Raskin berada pada kategori "sedang" atau cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan skor rata-rata tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat raskin yang dicapai sebesar 30,9 atau sekitar 77,3 % dari skor teoritiknya, yakni sebesar 40 skor.

Pembahasan

Hubungan Efektivitas Pengelolaan program Raskin dengan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai kedua variabel tersebut, maka pada bagian berikut ini akan dilakukan analisis hubungan antara kedua variabel penelitian tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik sederhana yaitu analisis *Chi-square* (Kai-kwadrat) dan analisis Koefisien Kontingensi. Untuk keperluan analisis data tersebut maka pertama-tama dilakukan tabulasi silang antara data variabel Efektivitas Pengelolaan program Raskin (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), khususnya RTM penerima Raskin. Untuk tabulasi silang tersebut maka dilakukan pemeriksaan/perhitungan kembali terhadap distribusi data yang tercantum dalam tabel *raw score*.

Berdasarkan perhitungan diperoleh gambaran mengenai tabulasi silang antara variabel efektivitas pengelolaan program Raskin (X) dengan variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabulasi Silang : Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kategori Variabel Efektif. Pengelolaan program Raskin (X)		Kesejahteraan Masyarakat (Y)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	f_0	4	5	3	12
	%	33.3	41.7	25.0	100.0
Sedang	f_0	1	28	3	32
	%	3.1	87.5	9.4	100.0
Tinggi	f_0	0	3	13	16
	%	0.0	18.8	81.3	100.0
Jumlah		5	36	19	360

Sumber : Data Tabel 1 dan Tabel 3

Distribusi data pada Tabel silang tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang menilai tinggi tingkat Efektivitas pengelolaan program Raskin di desa mereka, sebagian besar dari mereka adalah yang mempunyai tingkat kesejahteraan terkategori tinggi. Demikian pula responden yang menilai sedang/menengah tingkat Efektivitas pengelolaan program Raskin, sebagian besar dari mereka adalah yang tingkat kesejahteraannya terkategori sedang/menengah pula. Ini jelas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Raskin sebagai dampak positif dari Efektivitas pengelolaan program Raskin yang tinggi. Dengan kata lain, bahwa semakin tinggi efektivitas pengelolaan program Raskin, cenderung semakin meningkatkan pula kesejahteraan keluarga penerima Raskin itu sendiri. Sejauh mana derajat hubungan kedua variabel ini, masih perlu pengujian lebih lanjut melalui analisis *chi-square* dan koefisien kontingensi.

Dari hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai *chi-square* hubungan antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan Tingkat kesejahteraan keluarga penerima Raskin, yaitu : $\chi^2_{hitung} = 35,230$. Berdasarkan hasil nilai *chi-square* tersebut selanjutnya dihitung nilai koefisien kontingensi untuk mengetahui tingkat keeratan (derajat) hubungan kedua variabel, dan diperoleh nilai $KK = 0,62385$ kemudian dikonsultasikan dengan nilai maksimum daripada koefisien kontingensi = $0,8165$ dan nilai $\frac{1}{2} KK_{maks} = \frac{1}{2} (0,8165) = 0,4083$

Hasil-hasil analisis data tersebut di atas dapat diinterpretasikan dan dibahas, sebagai berikut : (1) Hasil analisis *chi-square* diperoleh nilai $\chi^2_{hitung} = 38,230$, sedangkan nilai *chi-square* kritik untuk taraf signifikan $0,01$ dan derajat bebas $(b - 1) (k - 1) = 4$, dari daftar distribusi *chi-square* di dapat $\chi^2 = 13,3$. Jelas bahwa nilai *chi-square* hasil penelitian adalah jauh lebih besar dari nilai *chi-square* kritik ($38,230 > 13,3$). Ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel penelitian yakni antara Efektivitas pengelolaan program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Raskin mempunyai hubungan yang sangat signifikan atau sangat meyakinkan pada taraf uji 1% atau taraf kepercayaan 99% . (2)

Hasil analisis koefisien kontingensi diperoleh nilai $KK = 0,62385$. Sedangkan nilai koefisien kontingensi maksimum untuk tebal kontingensi 3×3 adalah $= 0,8165$; dan nilai setengah koefisien kontingensi maksimum adalah $= 0,4083$.

Jelas bahwa nilai koefisien kontingensi hasil penelitian sebesar $0,62385$ jauh lebih besar dari nilai setengah koefisien kontingensi maksimum ($0,4083$). Ini memberikan petunjuk bahwa antara kedua variabel penelitian mempunyai hubungan yang cukup tinggi;

dengan kata lain Efektivitas pengelolaan program Raskin mempunyai derajat hubungan yang bermakna dan nyata dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Raskin.

Hasil penelitian tersebut di atas memberi petunjuk bahwa ternyata hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yakni : "Terdapat hubungan antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud" dapat teruji keberlakuannya dengan sangat meyakinkan Atau dengan kata lain "bahwa makin tinggi efektivitas pengelolaan program Raskin yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Mamahan, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan keluarga penerima raskin itu sendiri".

Dengan teruji atau diterimanya hipotesis penelitian tersebut maka berarti bahwa penelitian ini berhasil membuktikan teori yang telah diuraikan dalam bab tinjauan pustaka, yaitu bahwa efektivitas pengelolaan program Raskin terutama dalam proses pendistribusiannya mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga atau RTM penerima Raskin itu sendiri.

Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Antara Sebelum dan Sesudah Impelemntasi Program Raskin

Setiap kebijakan atau program pemerintah yang diimplementasikan selalu diharapkan agar memberikan dampak positif dan nyata bagi perubahan atau perbaikan kehidupan kelompok sasaran. Demikian halnya dengan pelaksanaan program Raskin di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan memberikan dampak positif dan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai penerima manfaat program Raskin

Untuk mengetahui atau menguji ada-tidaknya dampak yang ditimbulkan oleh program Raskin bagi peningkatan kesejahteraan RTM penerima manfaat program, maka perlu dilakukan perbandingan dua data tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM penerima manfaat program Raskin antara dua kurun waktu, yakni **sebelum** dan **sesudah** penerapan program tersebut. Untuk itu, data pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 akan disilangkan kemudian dilanjutkan dengan uji beda melalui penerapan Chi-square test.

Hasil analisis chi-square diperoleh nilai *chi-square* uji beda tingkat kesejahteraan Rumah Tangga Miskin antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, yaitu : $\chi^2_{hitung} = 19,896$. Hasil ini apabila dikonsultasikan dengan harga χ^2_{tabel} pada taraf uji 1% dengan derajat kebebasan (dk) = 4, maka dapat disimpulkan bahwa harga $\chi^2_{hitung} = 19,896$ jauh lebih besar dari

harga $\chi^2_{\text{tabel}} = 13,33$ yang bermakna bahwa ada perbedaan signifikan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah penerapan program Raskin. Artinya bahwa tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih tinggi/baik disbanding tingkat kesejahteraan RTM yang belum menerima manfaat dari program Raskin.

Kaitannya dengan konsumsi beras sebagai kebutuhan konsumsi makanan pokok masyarakat Indonesia, cukup relevan dikemukakan pendapat Abraham Maslow tentang hirarki kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan itu kemudian diikuti oleh kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai. dan, terakhir kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kebutuhan akan udara, makanan, dan minuman termasuk sebagai kebutuhan dasar. Bila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka orang mulai naik ke hirarki selanjutnya sampai hirarki keempat, kebutuhan untuk dihargai. Keempat kebutuhan ini disebut sebagai homeostatis. Artinya, kebutuhan satu sampai empat ini layaknya termostat yang menggerakkan manusia untuk memenuhinya sampai cukup. Ketika seseorang sudah merasa cukup, maka kebutuhan itu akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian orang akan masuk ke kebutuhan terakhir, yang oleh Abraham Maslow dinamakan drbsgsi kebutuhan "aktualisasi diri".

Tentu saja masing-masing orang mempunyai derajat berbeda dalam mengukur tinggi rendahnya upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari ini kita mendapati fakta bahwa sebagian masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan (keluarga pra serjahtera). Berdasarkan realitas ini, maka pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, yang salah satunya adalah pendistribusian "beras bersubsidi" atau yang populer dikenal dengan "beras untuk keluarga miskin atau Raskin". Dengan dilaksanakannya program Raskin, maka diharapkan agar masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat menyisihkan pendapatan mereka untuk membelanjakan kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya, karena untuk kebutuhan beras (sebagian) telah diberikan subsidi harga oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik bkesimpulan : 1). Efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori

"sedang" atau menengah. 2). Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hasil-hasil temuan dalam penelitian ini perlu ditindak lanjuti melalui beberapa : 1). Untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan program Raskin, khususnya dititik distribusi, maka disarankan agar Tim pelaksana dan pemerintah desa memperbaiki sistem pengelolaannya, terutama berkaitan dengan ketetapan kelompok sasaran RTM penerima manfaat program agar dapat terlayani secara keseluruhan sesuai dengan jumlah RTM, ketepatan harga dan jumlah (volume) beras yang didistribusikan per RTM. 2). Mengingat program Raskin memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan RTM, maka diharapkan agar program ini terus dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan dengan terus-menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada dititik distribusi (desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2007, *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007*, Jakarta.
- , 2011, *Pedoman Umum Program Raskin*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011, Jakarta
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- BKKBN, 1993, *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional*, BKKBN Pusat, Jakarta.
- Budiman, A., 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Bulkin, Farchan, 1998, *Kemiskinan dalam studi Politik Indonesia*, Transformasi Seri III, Jakarta.
- Chambers, R., 1983 *Rural Development : Putting the last first*. London, Logman
- Esmara, Hendra, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Effendi, Tajuddin Noer, 1993, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta : Adni Offset.
- Ismanto. Igh., 1991, *Kemiskinan di Indonesia Program IDT. Refleksi Setengah Abad*

Kemerdekaan Indonesia. Jakarta CSIS.

Jones, Gareth R. 1994, *Organizational Theory, Text and Cases*. USA. Wesley Publishing Company, Reading Massachusetts.

Koentjaraningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, Akademi Manajemen Perusahaan, YKN, Yogyakarta.

Martoyo Susilo., 1992, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPEE, Yogyakarta.

Moeljarto, V. dan S. Prabowo, 1997, *Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Sosial*, Dalam Analisis CSIS Tahun XXVI No. I Januari-Februari 1997.

Nasikun, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincoln, 1987, *Petani Desa dan Kemiskinan*. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Radwan, S., dan T. Alftan, 1978, *Household Survey For Basic Needs : Some Issues*, International Labour Review. Vol.117, No. 2.

Sayogyo, P., 1987, *Garis Kemiskinan Dan Minimum Kebutuhan Pangan*, Makalah pada Kongres II HIPIS di Manado.

Sigit, H., 1983, *Perkembangan Kesempatan Kerja*. Tanpa penerbit. Jakarta.

Soedjatmiko. 1998. Model Kebutuhan sebagai Strategi. Rajawali. Jakarta.

Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

The Kian Wie, 1983, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, LP3ES, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjokrowinoto, M., 1987, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana, Jakarta.

Todaro, M P., 1994, *Pembangunan Ekonomi 1*, Edisi ke lima (Penerjemah : Haris Munandar), P.T. Bumi Aksara, Jakarta.